

Arini. N.D, Hartono. S, Rochim. A. I (2023). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Prediksi Vol. 22(2). 102-108*

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Nisa Dwi Arini ^{1*}, Supri Hartono ², Achluddin Ibnu Rochim ³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: : [1nisadwirin@gmail.com](mailto:nisadwirin@gmail.com), [2suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id), 3didin@untag-sby.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

08 Mei 2023

Received in revised form:

22 Mei 2023

Accepted:

17 Juni 2023

Keyword:

Village, village fund management, Development, Evaluation.

Kata Kunci:

Desa, pengelolaan dana desa, evaluasi.

ABSTRACT

Currently the government is trying to encourage development both in cities and in rural areas. One of the government's efforts is to provide financial assistance to villages through the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) which will be used to assist villages in governance and village development. In a public policy, there is a need for policy evaluation, because with policy evaluation, improvements can be made to the policy. According to Dunn, evaluation is an assessment of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. This study uses a qualitative method which is research that reveals social situations by describing the reality that exists in the form of words and pictures that have been obtained in the field. The results of this study are that every development carried out by the village government has provided benefits to the community because it can solve problems that exist in the community. The government's development planning also involves the community. However, the development carried out cannot be carried out evenly.

ABSTRAK

Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mendorong pembangunan baik di kota maupun di pedesaan. Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dana kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana akan digunakan untuk membantu desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam suatu kebijakan publik diperlukan adanya evaluasi kebijakan, karena dengan adanya evaluasi kebijakan dapat dilakukan pembenahan dalam kebijakan tersebut. Menurut Dunn evaluasi merupakan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian yang mengungkapkan situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan yang ada dengan bentuk kata-kata maupun gambar yang telah didapat dilapangan. Hasil dari penelitian ini yakni setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat karena dapat memecahkan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Pada perencanaan pembangunan pemerintah juga melibatkan masyarakat. Namun, pembangunan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara merata.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: [1nisadwirin@gmail.com](mailto:nisadwirin@gmail.com)

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya lebih fokus membangun desa karena di desa sebagian besar penduduk Indonesia bermukim. Saat ini pemerintah juga sedang berusaha untuk mendorong pembangunan baik di kota maupun di pedesaan. Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dana kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana akan digunakan untuk membantu desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, hal tersebut dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dapat menciptakan desa menjadi mandiri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam suatu kebijakan publik diperlukan adanya evaluasi kebijakan, karena dengan adanya evaluasi kebijakan dapat dilakukan pembenahan dalam kebijakan tersebut. Menurut Dunn evaluasi merupakan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dari pengimplementasian suatu kebijakan yang mana dengan menjadikan masyarakat sebagai sasaran (Cendickia, 2021). Setelah evaluasi kebijakan dilakukan maka pembenahan dapat dilakukan sehingga dapat tujuan dari adanya kebijakan dapat tercapai yang kurang maksimal dari kebijakan tersebut.

Pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa (DD) seluruhnya direncanakan oleh pemerintah desa, dimana dalam perencanaan tersebut dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengetahui hal yang dibutuhkan melalui musyawarah sehingga hasil yang didapatkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa tujuan dana desa adalah salah satu cara pemerintah untuk membantu desa agar dapat menjadi kuat, maju, dan mandiri.

Dalam peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 pasal 11 ayat 2 dijelaskan bahwa pembagian dana desa di tiap provinsi dibagi berdasarkan jumlah desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor lainnya yang berada di provinsi tersebut. Dalam UU No. 28 Tahun 2022 pasal 14 ayat (7) dijelaskan bahwa Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagaimana dana desa dikelola dan rincian dana desa. Permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan dana desa yakni seringkali terdapat pegawai pemerintahan yang kurang mengerti mengenai tugasnya serta masih adanya kesulitan dalam pengelolaan dana desa, permasalahan lainnya yakni tidak semua masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan yang ada dengan bentuk kata-kata maupun gambar yang telah didapat di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif ini dapat menjawab permasalahan yang terjadi, sehingga lebih ditekankan pada pembahasan mengenai evaluasi pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di pemerintahan Desa Mojodowo. Dimana yang berada di Desa Mojodowo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

Fokus dalam penelitian ini yakni pada Evaluasi pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa yang sesuai dengan teori yang sesuai dengan teori Willim N. Dunn yang meliputi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Secara geografis Desa Mojodowo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Desa Mojodowo ini berada di ujung bagian selatan Kecamatan Kemlagi yang mana berbatasan dengan salah satu desa di Kecamatan Ngusikan. Desa Mojodowo memiliki luas wilayah $\pm 151,053\text{Ha}^2$, dengan memiliki luas wilayah tersebut Desa Mojodowo memiliki 2 dusun yakni Dusun Medowo dan Dusun Sidomulyo. Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn yang mana dalam teori ini terdapat enam kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Pemaparan dari kriteria-kriteria tersebut yaitu sebagai berikut:

Efektivitas

Menurut (William N. Dunn, 2003) efektivitas yang berarti apakah suatu alternatif yang dilaksanakan sudah mencapai hasil atau tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dalam penelitian ini berupa hasil pembangunan dari adanya Dana Desa pada tahun 2021. Pada temuan di lapangan, hasil yang diharapkan oleh pegawai aparat pemerintah Desa Mojodowo telah sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah desa. Hal ini dapat tercermin pada hasil wawancara di lapangan dengan Sekretaris Desa Mojodowo sebagai berikut:

*rencana dengan realisasinya sudah sesuai dengan harapan”
Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan Desa Mojodowo
”iya sudah sesuai dengan harapan”.*

Dari kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwasannya hasil pembangunan yang telah dilakukan telah sesuai dengan rencana pembangunan desa.

Dari kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwasannya hasil pembangunan yang telah dilakukan telah sesuai dengan rencana pembangunan desa. Selain hasil pembangunan, perencanaan pembangunan juga memiliki peranan yang penting, karena dengan adanya perencanaan ini pembangunan yang akan dilakukan dapat memiliki hasil yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Mojodowo sebagai berikut:

”untuk rencana pembangunan kita selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat sehingga kita mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat, jadi tiap-tiap RT dan tokoh masyarakat itu memberikan usulan yang mana nanti kita ambil prioritas dulu”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya pembangunan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena dalam setiap perencanaan pembangunan dilakukan musyawarah guna mengetahui kebutuhan masyarakat.

Efisiensi

Menurut (William N. Dunn, 2003) efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam mencapai suatu efektivitas. Efisiensi dalam penelitian berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh pihak Desa Mojodowo sebagai pengelola dari DD di Desa Mojodowo tahun 2021.

Mengenai alur pencairan dana desa di Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tahun 2021, seperti hasil dari wawancara dengan narasumber sekretaris desa Mojodowo sebagai berikut:

"mekanisme perencanaan Dana Desa ini pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun dulu yang dihadiri oleh RT dan tokoh masyarakat, nah dari situ tiap perwakilan ini mengajukan usulan dan tiap-tiap RT itu pasti memperjuangkan wilayahnya nah itu kita bahas di musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), di musrenbangdes sebelum menjadi APBDes kita lihat yang paling prioritas".

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya mekanisme tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

Kecukupan

Menurut (William N. Dunn, 2003) kecukupan yaitu seberapa jauh hasil dari pencapaian yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Pada kriteria ini menekankan pada hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Pada kriteria ini berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dari adanya DD di Desa Mojodowo dapat memecahkan masalah yang muncul di Desa Mojodowo. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota karangtaruna Desa Mojodowo sebagai berikut:

"sangat membantu, anak-anak bisa voly di tempat yang seharusnya tanpa harus menyewa atau menggunakan lapangan utama SD. Selain itu, sebelum ada drainase ini saat hujan air-air pada menggenang di jalan dan hampir ke rumah-rumah yang mana air itu dari jalan dan sungai"

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memecahkan permasalahan yang terdapat di masyarakat.

Perataan

Menurut (William N. Dunn, 2003) perataan yaitu biaya atau manfaat di distribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda. Dalam penelitian ini perataan berkaitan dengan bagaimana pendistribusian DD di Desa Mojodowo. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa Mojodowo sebagai berikut:

"pembagian dana untuk pembangunan itu tidak bagi per dusun sebenarnya, kita adakan waktu penyusunan RKP itu waktu musrenbangdes itu kan tiap RT sama tokoh masyarakat itu kan mengusulkan untuk pendidikan atau yang lainnya, nah itu kita ambil yang prioritas dulu"

Hal lainnya juga disampaikan oleh sekretaris desa Mojodowo sebagai berikut:

"kalau untuk BLT nya itu dibagi per pengajuan tiap RT nya, kan ada tiap RT nya banyak ada yang sedikit"

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pendistribusian dana desa ini tidak dapat dibagi secara merata, karena menyesuaikan pegajuan dari tiap RT, untuk pembangunan yang bersifat fisik tidak dapat didistribusikan secara merata karena terdapat kendala pada dana sehingga pemerintah desa mengambil yang prioritas.

Responsivitas

Menurut (William N. Dunn, 2003) responsivitas yaitu seberapa jauh suatu kebijakan bisa memuaskan kebutuhan dari kelompok masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini responsivitas berkenaan dengan suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah memuaskan kebutuhan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota Karangtaruna Desa Mojodowo sebagai berikut:

"Memuaskan mbak soalnya sebelum ada pembangunan seperti drainase ini kalau hujan air-air sering menggenang, kalau sekarang sudah engga, selain itu adanya lapangan bola voly ini juga temen-temen kalau mau ngadakan kegiatan lomba olahraga juga jadi mudah".

Selain itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat desa, karena setiap kali terdapat pembangunan infrastruktur masyarakat setempat ikut bergotongroyong untuk membantu pembangunan, hal ini disampaikan oleh salah satu Karangtaruna desa Mojodow sebagai berikut:

"Biasanya masyarakat sekitar tempat pembangunan dilakukan ikut membantu pelaksanaan melakukan pembangunan dan ini berasal dari inisiatif masyarakat sendiri".

Ketepatan

Menurut (William N. Dunn, 2003) ketepatan yaitu apakah hasil yang diharapkan benar-benar berguna atau bernilai. Dalam penelitian "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Mojodowo kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokero" berkenaan dengan apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa memberikan manfaat kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota Karang taruna desa Mojodowo sebagai berikut:

"Banyak memberikan manfaat, masyarakat menjadi terbantu oleh setiap pembangunan desa entah itu sarana maupun prasarana desa"

Hal itu juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut:

"Memberikan manfaat banget mbak bagi masyarakat karena dapat mengurangi permasalahan mereka seperti drainase ini, saat hujan sekarang sudah ndak banjir lagi"

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pendeskripsikan hasil data dengan fakta yang ditemukan di lapangan, peneliti menghubungkan temuan hasil di lapangan dengan teori yang dikemukakan oleh William N. Setelah melaksanakan penelitian, dapat dilihat hasil dari evaluasi pengelolaan DD dalam pembangunan desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yakni sebagai berikut:

Efektivitas

Menurut (William N. Dunn, 2003) efektivitas yang berarti apakah suatu alternatif yang dilaksanakan sudah mencapai hasil atau tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwasannya setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

telah sesuai dengan rencana pembangunan. Selain itu pembangunannya juga telah mencapai tujuan diadakannya pembangunan tersebut.

Efisiensi

Menurut (William N. Dunn, 2003) efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam mencapai suatu efektivitas. Dalam hal ini berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa agar dapat mencapai tujuan pembangunan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwasannya dalam setiap perencanaan pembangunan pemerintah melaksanakan musrenbangdes yang melibatkan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kecukupan

Menurut (William N. Dunn, 2003) kecukupan yaitu seberapa jauh hasil dari pencapaian yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya setiap pembangunan baik sarana maupun prasarana memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat desa. Karena setiap pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perataan

Secara merata kepada kelompok yang berbeda. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya pendistribusian dana desa ini tidak dapat dibagi secara merata, karena menyesuaikan pegajian dari tiap RT, untuk pembangunan yang bersifat fisik tidak dapat didistribusikan secara merata karena terdapat kendala pada dana sehingga pemerintah desa mengambil yang prioritas.

Responsivitas

Menurut (William N. Dunn, 2003) responsivitas yaitu seberapa jauh suatu kebijakan bisa memuaskan kebutuhan dari kelompok masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memuaskan masyarakat desa, karena pembangunan yang dilakukan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, selain itu juga dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga mendapat respon yang baik dari masyarakat karena setiap pemerintah melakukan pembangunan, masyarakat sekitar juga ikut gotongroyong membantu pembangunan.

Ketepatan

Menurut (William N. Dunn, 2003) ketepatan yaitu apakah hasil yang diharapkan benar-benar berguna atau bernilai. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya hasil dari setiap pembangunan yang dilakukan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat baik dalam hal sarana maupun prasarana.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa juga terdapat keterlibatan masyarakat, meskipun pembangunan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara merata karena adanya keterbatasan dana. Namun, meskipun begitu setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat karena pembangunan yang dilakukan dapat memecahkan setiap permasalahan yang muncul di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- William N. Dunn. (2003). William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf (p. 710).
- Cendickia, gilang wana wijaya. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti). Raja Grafindo Perkasa, 102.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.